

RILIS MEDIA

JAJAK PENDAPAT AHLI TENTANG ISU-ISU KRUSIAL KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN

5 JUNI 2022

Populi Center, lembaga penelitian kebijakan dan opini publik yang bersifat nirlaba, menyelenggarakan jajak pendapat ahli mulai dari tanggal 19 hingga 26 Mei 2022 dengan mewawancarai 50 orang narasumber ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidang ilmu-ilmu sosial, politik, dan pemerintahan. Tujuan dari jajak pendapat ini adalah untuk memetakan pendapat para ahli terkait isu-isu krusial pemerintahan yang sering kali menjadi perdebatan, seperti penilaian demokrasi, otonomi daerah, Ibu Kota Negara, ekonomi digital, Pokok-Pokok Haluan Negara, dan desain kelembagaan pemberantasan korupsi.

Jajak pendapat ini tidak bermaksud untuk menyimpulkan secara keseluruhan gambaran umum mengenai kondisi sosial politik di Indonesia. Jajak pendapat juga tidak berpretensi untuk mewakili pandangan para ilmuwan sosial di Indonesia, maupun lembaga yang menaungi para ahli yang menjadi narasumber. Hasil dari jajak pendapat ini dimaksudkan untuk memantik debat publik terkait dengan isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan.

Terdapat beberapa temuan menarik dari jajak pendapat kali ini. **Pertama**, dari 50 narasumber ahli, sebesar 68 persen menilai baik pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satu ahli menyebutkan bahwa indikator demokrasi dinilai berjalan relatif baik dikarenakan adanya sistem kepartaian yang stabil, masih terjaminnya ruang untuk menyampaikan pendapat, dan kepercayaan (*trust*) terhadap pemerintah yang cukup tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat 32 persen narasumber ahli yang menilai pelaksanaan demokrasi Indonesia buruk/sangat buruk.

Kedua, pada pertanyaan mengenai kondisi-kondisi spesifik kehidupan politik dan kenegaraan, sebagian besar narasumber ahli melihat terjadi kemunduran dalam hal kebebasan berpendapat (58 persen), pemberantasan korupsi (52 persen), partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan strategis (52 persen), dan *checks and balances* eksekutif dan legislatif di tingkat pusat (52 persen). Hanya sebagian kecil dari para ahli yang melihat ada kemunduran dalam hal penegakan hukum (36 persen), keterbukaan informasi publik (28 persen), dan kebebasan berserikat/berkumpul (26 persen). Temuan ini menarik, mengingat ruang menyampaikan pendapat dinilai terjamin, namun kebebasan berpendapat terasa menurun.

Ketiga, presiden menjadi aktor yang paling baik menyerap aspirasi publik, dibandingkan aktor-aktor lain. Di antara empat aktor politik yang dievaluasi kemampuannya dalam menyerap aspirasi publik, Presiden menempati posisi teratas sebagai aktor politik yang dianggap paling baik dalam menyerap aspirasi publik (78 persen). Sementara aktor politik lainnya, yaitu anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan partai politik dianggap relatif kurang mampu menyerap aspirasi publik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem presidensial semakin menguat, namun di sisi yang lain kepercayaan terhadap representasi politik di parlemen rendah. Konsekuensi-konsekuensi penguatan ini perlu untuk dilihat dari aspek prospek *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif di masa mendatang.

Keempat, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dinilai diperlukan dalam bingkai politik pemerintahan. Mayoritas narasumber ahli (60 persen) menjawab PPHN saat ini masih diperlukan dalam bingkai politik pemerintahan di Indonesia. Salah satu alasan yang disampaikan oleh ahli ialah bahwa PPHN diperlukan agar fokus atau orientasi pembangunan tetap terjaga sekalipun presiden atau pemerintahan silih berganti. Di luar itu, masih terdapat 36 persen narasumber ahli yang menilai PPHN tidak diperlukan lagi, dan sebesar 4 persen lainnya tidak dapat menilai atau menolak untuk merespons pertanyaan ini. Dalam konteks praktik

sistem presidensial, kedudukan PPHN perlu untuk terus diperbincangkan, terutama untuk melihat seberapa jauh hal tersebut menyandera atau tidak menyandera presiden terpilih.

Kelima, mengenai otonomi daerah, ketika narasumber ahli ditanyakan mengenai wacana pembentukan daerah otonomi baru, mayoritas narasumber ahli (68 persen) menjawab kebijakan tersebut tidak mendesak. Hanya terdapat 20 persen yang menjawab pembentukan daerah otonomi baru mendesak untuk dilakukan, dan tidak ada satupun ahli yang menjawab sangat mendesak. Adapun sebesar 12 persen narasumber ahli tidak merespons pertanyaan ini. Otonomi daerah perlu kembali direnungkan, apakah menjadi jalan tepat untuk mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat.

Keenam, saat para narasumber ahli diminta pendapatnya terkait apakah setuju atau tidak setuju apabila POLRI berada di bawah koordinasi sebuah kementerian, sebagian besar (60 persen) menjawab setuju. Di antara ahli yang menjawab setuju, persoalan kontrol terhadap institusi kepolisian menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan. Adapun sebesar 34 persen narasumber ahli menjawab tidak setuju, dan tidak ada satu pun narasumber ahli yang menjawab sangat tidak setuju. Adapun 6 persen lainnya menolak untuk merespons pertanyaan ini. Kedudukan POLRI patut untuk diperhatikan, terutama untuk meningkatkan kepercayaan terhadap salah satu institusi penegak hukum tersebut.

Ketujuh, sebesar 52 persen narasumber ahli menjawab tidak setuju apabila lembaga sejenis KPK dibentuk di tingkat daerah. Beberapa ahli lebih sekuat untuk memperkuat fungsi dari lembaga-lembaga yang ada ketimbang membentuk lembaga baru di daerah yang berpotensi syarat konflik kepentingan. Sementara yang menjawab setuju lembaga seperti KPK dibentuk di daerah ialah sebanyak 48 persen. Salah satunya beralasan agar jangkauan pemberantasan korupsi lebih luas lagi hingga ke daerah-daerah.

Kedelapan, mengenai pemindahan ibu kota negara, sebagian besar narasumber ahli setuju dengan kebijakan pemindahan ibu kota (58 persen menjawab setuju/sangat setuju). Salah satu ahli menyebut bahwa pemindahan ibu kota penting demi pemerataan pembangunan, serta untuk menghilangkan stigma Jakarta sentris yang sering muncul. Meskipun demikian, cukup banyak para ahli ini yang masih keberatan dengan rencana pemindahan ibu kota ini (40 persen menjawab tidak setuju/sangat tidak setuju). Salah seorang ahli yang menjawab menolak pemindahan berpendapat bahwa pemulihan kondisi pasca pandemi saat ini lebih penting dibanding pemindahan ibu kota yang membutuhkan biaya besar. Adapun 2 persen lainnya tidak/menolak menjawab.

Kesembilan, masih berkaitan dengan ibu kota negara, terdapat separuh (50 persen) narasumber ahli ini yang setuju apabila pemindahan ibu kota dijadikan bagian dari kontrak politik dengan pemerintahan yang akan datang. Salah satu ahli berpendapat kontrak politik diperlukan agar agenda pemindahan ibu kota tidak mangkrak seperti masa-masa sebelumnya. Sementara itu, sebagian narasumber ahli lainnya (48 persen) berpendapat hal tersebut tidak perlu. Salah satunya dikarenakan pemindahan IKN sudah menjadi keputusan politik yang disepakati pemerintah dan DPR saat ini, dan karenanya bersifat mengikat bagi pemerintahan selanjutnya. Sebanyak 2 persen narasumber ahli tidak merespons pertanyaan ini.

Kesepuluh, di antara sejumlah kebijakan masa pandemi yang ditanyakan pada narasumber ahli, kebijakan vaksinasi nasional merupakan kebijakan yang dianggap paling berhasil dengan skor penilaian 7,6. Diikuti dengan pelayanan kesehatan (7,0), transformasi ekonomi digital (6,8), penerapan *e-government* (6,8), dan pembelajaran *online* (6,6). Berdasarkan hasil ini, pasca pandemi COVID-19, Indonesia memiliki peluang untuk menggunakan platform digital sebagai akselerator penguatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, maupun kesehatan.

Kesebelas, terkait ekonomi digital, sebagian besar narasumber ahli (58%) menilai pemerintah masih belum optimal dalam memberikan dukungan pada aktivitas ekonomi digital. Salah satu ahli menyebutkan, dukungan yang belum optimal tersebut dapat terlihat dari belum meratanya jaringan internet di tanah air, serta kecepatan internet yang masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Meskipun demikian, tidak sedikit pula (40 persen) narasumber ahli yang menilai bahwa pemerintah telah cukup optimal dalam memberikan dukungan untuk menunjang ekonomi digital. Di antara yang berpendapat demikian menyebut bahwa jangkauan pemasangan *fiber optic* sudah cukup luas dengan Telkom sebagai salah satu pemain utamanya.

Kedua belas, mengenai arus besar revolusi industri 4.0, sebanyak 78 persen narasumber ahli menilai bahwa Indonesia dapat mengikuti arus revolusi industri 4.0. Sementara itu 20 persen narasumber ahli yang menilai bahwa Indonesia tidak dapat mengikuti arus revolusi 4.0. Adapun sebesar 2 persen narasumber ahli yang tidak bisa menilai/menolak menjawab pertanyaan ini. Peluang untuk mengikuti revolusi industri 4.0 terbuka lebar, meski perlu diperhatikan pula tantangan dan langkah strategis yang perlu diambil.

Secara garis besar, hasil jajak pendapat ahli menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia dinilai cukup baik meskipun dengan beberapa aspek yang dianggap mengalami kemunduran, terutama berkaitan dengan kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan strategis, serta praktik *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif di tingkat pusat. Dalam hal tata kelola pemerintahan, Presiden masih dianggap sebagai aktor politik paling baik dalam menyerap aspirasi publik. Terdapat pula kepentingan untuk memastikan agenda pembangunan melalui PPHN, pentingnya menata koordinasi POLRI, melanjutkan moratorium daerah otonomi baru, melanjutkan pemindahan Ibu Kota Negara, serta memperkuat infrastruktur ekonomi digital.

Adapun terkait wacana pembentukan KPK di daerah, lebih banyak narasumber ahli yang menyatakan ketidaksetujuannya. Terkait apakah diperlukan adanya kontrak politik pemindahan Ibu Kota Negara dengan pemerintahan yang baru mendatang, pendapat para ahli terbelah antara yang setuju dan tidak setuju. Secara umum para ahli menilai baik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di masa pandemi, antara lain vaksinasi nasional, pelayanan kesehatan, transformasi ekonomi digital, penerapan *e-government*, dan pembelajaran *online*. Hal lain yang tidak kalah penting ialah optimisme para ahli bahwa Indonesia dapat mengikuti arus revolusi industri 4.0.

Contact Person:

Rafif Pamenang Imawan
Peneliti, Populi Center
(0813-2572-7778)